

Mandulnya G-20

Peremuan G-20 di Seoul, Korea Selatan, pekan lalu berlangsung seolah antiklimaks. Agenda yang digembar-gemborkan para pemimpin negara berkaitan dengan isu *global imbalances* alias ketidakseimbangan perdagangan dan ekonomi global yang terutama dipicu perang kurs mentah kembali, bahkan berakhir menyedihkan: sekadar sanksi moral.

Tidak hanya muncul kesan bahwa para pemimpin negara lebih mengedepankan retorika ketimbang aksi nyata dalam mengatasi ketidakseimbangan global; pertemuan G-20 justru mencuatkan kecemasan bahwa para pemimpin negara bertindak di luar apa yang mereka nyatakan.

Hal itu lebih mencuat, mengingat isu sentral terkait dengan tuduhan atas ketidakseimbangan global yang berdalih perang kurs sebenarnya dialamatkan kepada China. Beijing saat ini menjadi ancaman serius tidak saja bagi Amerika Serikat dan Jepang, tetapi juga bagi Eropa dan dunia.

Daya saing produk China yang begitu hebat dan penetratif dituduh secara berjamaah oleh kelompok negara industri konvensional (untuk menyebutkan kelompok AS, Eropa dan Jepang), sebagai hasil dari "manipulasi" kebijakan kurs yuan.

Kurs mata uang itu dianggap terlalu rendah sehingga memberikan manfaat perdagangan internasional bagi produk China.

Beijing, yang kemudian ditekankan secara berjamaah oleh kelompok konvensional itu, tak bersedia tunduk.

Bahkan makin memperlihatkan kekukuhannya dalam menjaga daya saing dan penetrasi produknya ke pasar global, sembari tetap mempertahankan gaya mengelola nilai tukarnya sendiri.

Washington, yang paling terpukul oleh China sebagai *the rising economy*, berdiri paling depan dalam mengemukakan kebijakan Beijing ihwal kurs mata uang. Maka, lahirlah situasi yang disebut perang kurs itu.

Namun, Washington pun di balik layar justru menempuh berbagai kebijakan moneter yang tujuannya mengatur agar nilai dolar AS menjadi lebih murah.

Itu mengapa lantas muncul kesan kuat bahwa tekad memerangi perang kurs lebih sekadar retorika.

Bahkan, pertemuan G-20 pun akhirnya gagal menemukan kata sepakat. Hasil maksimal hanyalah pernyataan sikap bahwa "manipulator" mata uang akan dikenakan sanksi moral. Ini tentu konyol dan lucu, ketika sanksi moral yang bicara.

Kenyataan itu justru menyembulkan kesimpulan serius: apa manfaat kehadiran kelompok G-20 tersebut, ketika kelompok itu tak mampu berbuat apa-apa terhadap isu inti dan utama yang dihadapi masyarakat global?

Kita, terus terang, sangat khawatir kalau kelompok ini cuma melestarikan tradisi forum ekonomi global seperti APEC yang ternyata tak bergigi.

Lalu apa gunanya para pemimpin negara berkumpul dengan biaya begitu mahal, namun lebih banyak gebayr ketimbang menghasilkan keputusan konkretnya?

Apakah China mengerti?

Kepemimpinan perekonomian Amerika sedang diuji. Pada pertemuan negara anggota G20 di Seoul pekan lalu, China menolak tuntutan Washington untuk menghentikan manipulasi terhadap mata uang miliknya.

China kemudian bersatu dengan Jerman dan Brasil yang mengkritik rencana Federal Reserve untuk menyuntikkan dana miliaran ke dalam perekonomian.

Konferensi Tingkat Tinggi ini jarang menghasilkan terobosan. Meskipun hal ini tampak mengisyaratkan kekalahan, pemerintahan Obama mungkin melangkah semakin dekat untuk mencapai salah satu tujuan inti mereka.

Tekanan ekonomi internal pada akhirnya nanti mungkin akan memaksa Beijing untuk membiarkan nilai mata uangnya naik.

Mata uang renminbi yang murah dan telah membantu membangun China menjadi negara pengeksport terbesar dunia ini sedang memanasakan perekonomiannya.

• *International Herald Tribune*, 13 November

Mempersoalkan KTT APEC

Para pemimpin negara-negara Asia Pasifik mengadakan pertemuan di Yokohama dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Apakah mereka akan membahas visi dengan tujuan realistik dari perdagangan bebas di kawasan Pasifik?

KTT APEC diselenggarakan untuk menghancurkan negara-negara yang secara total meliputi 40% populasi dunia dan 50% hasil ekonomi global.

Kerangka kerja regional baru untuk perdagangan bebas juga penting untuk Jepang, yang bergantung pada perdagangan untuk kesejahteraan ekonomi.

Perdana Menteri Naoto Kan, yang memimpin pertemuan APEC di Yokohama, diharapkan dapat menunjukkan tanggung jawab untuk mengangkat gagasan ini.

Namun, APEC telah kehilangan pegangan dan belum membuat pencapaian penting selama beberapa tahun. Jepang menjadi salah satu alasan untuk isu tersebut.

• *The Asahi Shimbun*, 12 November

Pertahanan dengan anggaran terbatas

Banyak alutsista TNI berusia di atas 20 tahun

OLEH FAHRUDDIN SALIM
Tim Ahli di DPR RI, doktor manajemen bisnis dari Unpad Bandung

Upaya pengembangan postur dan struktur pertahanan sangat terkait dengan kondisi keuangan negara.

Keterbatasan keuangan negara dan skala prioritas pembangunan berdampak pada masih rendahnya anggaran pertahanan.

Dalam pengadaan alutsista sekarang ini, Indonesia dihadapkan situasi di mana keterbatasan anggaran menjadi faktor yang sangat signifikan, sementara tekanan politik dari negara-negara utama pemasok persenjataan masih cukup besar walaupun sudah relatif membaik.

Kita masih ingat bagaimana Indonesia pernah mengalami embargo alutsista dari negara maju yang dikaitkan dengan persoalan domestik. Kondisi tersebut membuat opsi pendanaan modernisasi alutsista menjadi sangat terbatas pada utang luar negeri, baik melalui mekanisme komersial yang umum atau pinjaman murni, maupun mekanisme bantuan pinjaman melalui penjaminan oleh kredit ekspor.

Permasalahan pendanaan pembangunan ini akan tetap berlanjut jika tidak dilakukan upaya-upaya strategis dan terobosan. Sebagian besar alutsista TNI dari segi usia sudah lebih dari 20 tahun dan sebagian darinya memiliki sisa usia pakai 7-15 tahun. Dari segi teknologi juga sudah usang.

Menurut Panglima TNI Djoko Santoso (November 2009), jumlah dan kondisi alat utama alutsista milik TNI saat ini hingga akhir 2009 masih jauh dari kon-

yang harus bisa melaksanakan tugas operasional yang sejarang ini, terus dan akan dilakukan.

Kendati begitu, upaya mewujudkan *minimum essential force* dalam 5 tahun mendatang, dengan berpijak pada postur dan struktur pertahanan saat ini, jelas belum memadai. Sebab pengembangan teknologi pertahanan harus mampu menyelenggarakan perkembangan teknologi pertahanan di seluruh dunia. Hal ini terkait dengan operasi militer yang terjadi, khususnya dalam dalam abad ke 21, dan menghadapi kemungkinan masa depan serta peran teknologi di dalamnya.

Terus turun

Pada awal RPJMN 2004-2009, alokasi anggaran pertahanan sebesar 1,1% PDB tetapi dalam pelaksanaannya justru menunjukkan penurunan. Dalam 3 tahun terakhir belanja pertahanan berturut-turut sebesar 0,92% PDB (2007), 0,70% PDB (2008), dan 0,63% PDB (2009).

Menurut Buku Putih Pertahanan (Dephan, 2008), dalam rangka mewujudkan *minimum essential force* dalam 2-3 tahun mendatang total anggaran pertahanan diharapkan dapat mencapai di atas 1% dari PDB dan selanjutnya meningkat menjadi minimal 2% dari PDB dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan.

Sebagian besar alutsista TNI dari segi usia sudah lebih dari 20 tahun dan sebagian darinya memiliki sisa usia pakai 7-15 tahun. Dari segi teknologi juga sudah usang.

Menurut Panglima TNI Djoko Santoso (November 2009), jumlah dan kondisi alat utama alutsista milik TNI saat ini hingga akhir 2009 masih jauh dari kon-

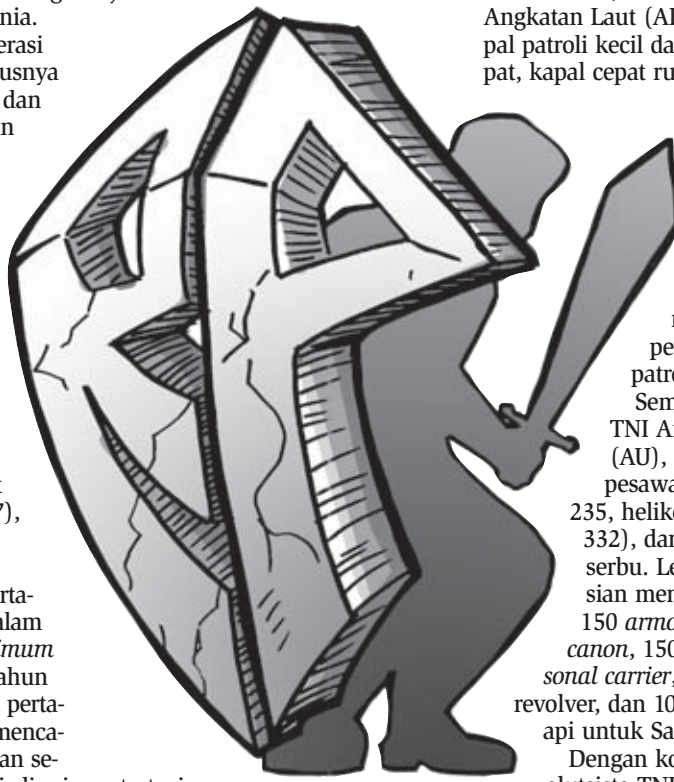
disi memadai. Kondisi kendaraan tempur yang mencerminkan kekuatan taktis matra darat saat ini hanya 794 unit dan 69% dalam kondisi siap operasi dan itu pun dengan usia operasi rata-rata sekitar 25 tahun.

Matra laut jumlah dan kondisi kapal sebagai kekuatan utama hanya terdiri dari 18 kapal pemukul yang memiliki persenjataan

alutsista sesuai Renstra 2010-2015 yang dipesan di industri pertahanan, di antaranya untuk TNI Angkatan Darat (AD) adalah pengadaan persenjataan infanteri, meriam artileri medan (armed) 114 pucuk, rudal misral 156 pucuk, kendaraan tempur 311 buah, pesawat udara 132 unit, amunisi, dan alat perhubungan 2.451 set.

Kemudian, kebutuhan TNI Angkatan Laut (AL) adalah kapal patroli kecil dan patroli cepat, kapal cepat rudal, kapal tanker, kapal bantu angkut pasuk, kapal bantu angkut tank, kapal angkut serbaguna, dan pesawat udara patroli maritim. Sementara itu, TNI Angkatan Udara (AU), di antaranya pesawat angkut CN 235, helikopter (NAS 332), dan senapan serbu. Lembaga kepolisian membutuhkan 150 *armored water canon*, 150 *armored personal carrier*, 100.000 revolver, dan 100.000 senjata api untuk Sabhara.

Dengan kondisi tersebut, alutsista TNI relatif masih kurang dan dengan tingkat kesiapan alutsista yang belum maksimal. Ditambah lagi, sebagian besar alutsista TNI mengalami penurunan efek penggentar (*deterrent effect*) yang merupakan pendukung upaya diplomasi juga berakibat pada kapabilitas TNI dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat akibat bencana alam. Kasus Sipadan dan Ligitan dan sengketa Blok Ambalat merupakan contoh



BISNIS/ILHAM NESABANA

strategis dan 83% siap operasi, 72 kapal patroli yang ada telah berusia lebih dari 25 tahun dan siap operasi 68% serta 56 kapal pendukung berusia 25-40 tahun dengan kesiapan operasi 43%.

Matra udara terdiri dari 47 pesawat angkut, 69 pesawat tempur, 38 helikopter dan 57 pesawat latih dengan tingkat kesiapan rata-rata 45%.

Sementara itu, kebutuhan

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi *Bisnis Indonesia* dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan

Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis.

“ VERBATIM ”

Surat-surat harus dilengkapi dengan identitas pribadi

Harapan penegakan hukum

Amburadulnya penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia mengakibatkan semakin meningkatnya pelanggaran hukum, dan rendahnya wibawa hukum di mata publik.

Hukum bisa dimainkan, keadilan bisa dibeli, dan kebebasan mudah diatur. Bahkan para terpidana dan tersangka seolah tidak hidup dalam penjara/tahanan, karena bisa ke manapun dan kapan pun asal punya uang sogokan ke penegak hukum.

Dalam kasus Gayus Tambunan, telah membuktikan banyak aparat penegak hukum yang lalai, memanfaatkan situasi, dan mafia hukum masih kental di lingkungan penegak hukum. Banyak aparat keamanan telah menjadi korban Gayus, karena iming-iming uang, sehingga mereka terpesok dalam kenistaan. Hal ini dapat diibaratkan 'pagar makan tanaman', hukumannya harus berat.

Bobroknnya moral dan etika penegak hukum, perlu segera ditangani secara serius dan tegas. Reformasi penegakan hukum perlu segera dilakukan. Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham harus bersinergi melakukan reformasi baik sistem maupun SDM-nya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan bahwa aparat hukum yang bekerja sama dan memberikan kesempatan kepada Gayus Halomoan Tambunan untuk keluar dari ruang tahananannya, harus dihukum seberat-beratnya. Ancaman hukuman pidananya seumur hidup, kalau bisa lebih dari seumur hidup.

Pemberian izin keluar tersebut merupakan satu bukti baru praktik mafia hukum di Indonesia. Fenomena seperti ini sudah

banyak dan harus dibongkar sampai ke akarnya. Tak hanya aparat yang bekerja sama dengan Gayus saja yang dihukum berat. Gayus pun harus dihukum seberat-beratnya.

Dia hanya ketawa-ketawa saja seperti tak berdos, padahal jutaan orang dimiskinkan. Jadi tidak hanya dihukum tapi dia (seharusnya) dimiskinkan dan dihukum berat.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto mengatakan setidaknya ada lima hal yang membuat tahanan di rumah tahanan tersebut bebas kelu-yuran.

Pertama, sistem pengelolaan rumah tahanan amburadul. *Kedua*, integritas penjaga rumah tahanan yang rendah. *Ketiga*, gaji minim yang diterima petugas penjaga rumah tahanan. *Keempat*, lemahnya pengawasan petugas terhadap para tahanan. *Kelima*, rendahnya ketaatan terhadap hukum. Baik yang jaga maupun yang ditahan, ya harus taat hukum.

Tindakan yang telah dilakukan Kepolisian RI seperti pencopotan Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brimob yang diduga mendapatkan sogokan dari Gayus, dapat dinilai sebagai kemajuan.

Dengan terungkapnya kasus 'pelesiran' Gayus dari ruang tahanan ini, juga jadi memperlihatkan besarnya jaringan yang dimiliki terdakwa kasus mafia pajak itu di lingkungan lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, diharapkan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo dan Darmono (Plt Jaksa Agung) dapat dengan tegas menjatuhkan hukuman seberatnya, kemudian dibongkar jaringannya.

Saya mengimbau kepada seluruh aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya, karena

PEMBACA MENULIS

masalah keadilan harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan di hadapan Tuhan kelak.

PRIBADI SANTOSO UTOMO

Perumahan Taman Pagelaran, Padasuka, Ciomas, Bogor 16610

Masih soal dampak kunjungan Obama

Air Force One telah *take off* dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sosok Presiden fenomenal telah pergi kembali ke negerinya, Paman Sam. Masih hangat terasa sejak kepergian Obama dari Indonesia telah memberikan kenangan manis bagi rakyat Indonesia dan kenangan manis juga buat Obama karena telah pulang kampung.

Walaupun hanya sebentar, membuat sebagian orang terkenang akan sosok Barry si Presiden Amerika tersebut.

Aura positif Obama telah membawa dampak sangat berarti bagi Indonesia, khususnya bagi perekonomian Indonesia sendiri yang saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat. Banyak investor asing melihat Indonesia sebagai pelabuhan investasi mereka, karena Indonesia telah mengalami kemajuan di bidang ekonomi.

Terbukti untuk saat ini saja investor yang telah ada di Indonesia enggan untuk pergi dan terkesan betah untuk tinggal di pasar domestik, karena rupiah telah menguat di atas level 8.920 per dolar, dipicu juga dengan digulirkannya *quantitative easing* senilai US\$600 miliar.

DESSY INDR

Jln. Ir Juanda No.12 Depok, Jawa Barat

Kritik, saran, dan komentar bisa disampaikan melalui surat ke redaksi *Bisnis Indonesia* atau e-mail: redaksi@bisnis.co.id

Bisnis Indonesia

Suwantini Oemar, Wisnu Wijaya, Zulfriald.

Tim Pengembangan Redaksi: Adhitya Noviard, Y. Bayu Widagdo, Manajer Sekretariat Redaksi: Indah Sutrinigrum.

Asisten Redaksi: Algotho Putranro, Afrika Rani Hernanda, Arif Pitoyo, Bambang Supriyanto, Bastanul Siregar, Elsyia Refianty, Fahmi Achmad, Gajah Kusumo, Junaldi Halik, Lutfi Zaenudin, Moh. Fatkhul Maskur, Muhammad Munir Haikal, Rahayuningsih, Sylviana Pravitka R.K.N., Taufik Wisastra, Tomy Sasangka, Yayan Indrayana, Yeni H. Simanjuntak, Yusran Yunus. Staf Redaksi: Achmad Aris, Afriyanto, Agust Supriadi, Anugerah Perkasa, Arif Gunawan Sulistiyono, Asep Dadan Muhandaz, Bambang P. Jatmiko, Berliana Elisabeth, Dewi Astuti, Diana Lestari, Elvani Harifaningsih, Erna Sari Ulina Girsang, Erwin Tambunan, Fajar Sidik, Fita Indah Maulani, Hendri T. Asworo, Herry Suhendra, Hendra Wibawa, Hilda Sabri Sulistyo, Irsad, Irvin Avriano, John A. Oktaveri, Linda Teti Silintonga, Maria Yuliana B., Mia Chittra Disari, M. Tahir Saleh, Mulla Ginting Munthe, Nana Oktavia Mustiana, Nurbahtil, Nurudin Abdullah, Rahmayulis Saleh, Ratna Ariyanti, Raydion, Rini Effita Hendry, R. Fitriana, Roni Yuniarto, Rudi Arifrianto, Sepudin, Siti Munawaroh, Theresia Diyah Wulandari, Tri Dirgantara Pamenan, Tularij, Yusuf Waluyo Jati. Perwakilan: Bandung: Asep Mh. Mulyana (Manajer), Hilman Hidayat (Asisten Redaktur), Muhammand Sulyan. Makassar: M. Noor Korompot (Manajer), Kwan Men Yon (Asisten Redaktur). Medan: Melvin A. Sebayang (Manajer), Master Sihotang. Semarang: Eddy Barlianto (Manajer), Endot Brilliantono, Rahmat Sujitanto. Surabaya: Galih Prakoso (Manajer), Samantha Ardiansyah (Asisten Manajer Pemasaran), Marlina A. Jobs (Asisten Redaktur), Bambang Sutedjo (Kooridinotor Malang), Dwi Wahyuni, Wahyu Darmawan. Batam & Pekanbaru: Suyono Saputra (Manajer). Foto: Andy T. Kurniadi, Dedi Gunawan, Endang Mochtar, Kelik Taryono, Melly Riana Sari, Yayus Yuwoprihanto. Artistik: Adi Purdiyanto, Agus Taufik Rido, Tutun Purnomo.

Manajer Produk: Andri Trisuda. Manajer Media Digital: Deriz Syahpatria Syarief. Penerbit: PT Jurnalindo Aksara Grafika, Direksi: Lulu Terianto (Direktur Utama), Ahmad Djauhar, Endy Subiantoro. Alamat Kantor: Wisma Bisnis Indonesia, Lt. 5-8, Jl. KH Mas Mansyur No. 12A, Karst Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220. Telepon: (021) 57901023 (hunting). Faks. redaksi: (021) 57901024. Pemasaran: (021) 57901028. Rekening bank: PT Jurnalindo Aksara Grafika, BCA cab. Wisma Asia 084-303.757-4; PT Jurnalindo Aksara Grafika, Bank Mandiri cab. Wisma Bisnis Indonesia 121-009.009999-9; PT Jurnalindo Aksara Grafika, Bank BNI (S) cab. Kramat 10528868. Kantor Perwakilan: Jawa Timur, Jl. Opak No. 01 Surabaya, Tel. (031) 5670748, Fax. (031) 5675853. Malang, Pertokoan Sarangan Jl. Sarangan No. 1 a Malang, Telp. (0341) 402727, (0341) 480630, Fax (0341) 402728. Denpasar Jl. Suli No. 119 Blok B-3 Denpasar 80233 Telp. 0361-7446604, Fax. (0361) 251067. Jawa Tengah, Jl. Sompok Baru No. 79 Semarang, Telp. (024) 8442852, Fax. (024) 8454527. Jawa Barat, Jl. Buah Batu No. 46B, Bandung 40261 Telp. (022) 7321627, 7321637, 7321698, Fax. (022) 7321680. Sumatra Utara, Kompleks Istana Bisnis Center, Medan Maimun Jl. Brigjend. Katamsno No. 6, Medan, Telp. (061) 4554121/4553035 Fax: (061) 4553042. Riau, Jl. Pepaya No. 42, P. Karam Sukajadi, Pekanbaru 28127. Telp. (0761) 7048300, Fax (0761) 40335. Batam, Kompleks Ruko Mahkota Raya Blok C No.8 Batam Centre - Batam Telp: (0778) 748 3156 / Fax (0778) 748 3154, Indonesia Timur, Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC Makassar GA-9 No. 16, Telp: (0411) 8114203 Fax: (0411) 8114253. Balikpapan, Balikpapan Superblock, Jl. Jend. Sudirman Stal Kuda Blok A/18, Balikpapan Telp. (0542) 7213507, Fax. (0542) 7213508. Harga langganan: Rp. Jawa Rp117.000/bulan, luar Jawa Rp117.000/bulan. Tarif iklan: Display Rp33.500/mm kolom, berwarna Rp20.000/mm kolom, berwarna Rp33.500/mm kolom, baris Rp19.000/minim 3 baris. ISSN 0215-2045. Surat Terbit: 001/SK/Menpen No. 017/SK/Menpen/RI/UPPA/7.1/1985, 4 Desember 1985, Angkota SPS No. 116/1985/11A/2002, Terbit 7 kali seminggu.